

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

# Pemprov Mesti Perbaiki Kualitas APBD

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakarta diminta untuk memperbaiki kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna merawat Jakarta.

"Karena Jakarta ini Pendapatan Asli Daerah-nya lumayan dan APBD-nya besar. Tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta," kata

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Rabu. Menurut Prasetyo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.

Untuk itu, dalam Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Prasetyo meminta Pemprov Jakarta menyisir kembali kegiatan. Kemudian, tetapkan berdasarkan skala prioritas sehingga APBD Jakarta berkualitas.

Prasetyo telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota. Berdasarkan pelaksanaannya Musrenbang tersebut, Prasetyo melihat banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam kegiatan anggaran.

"Jadi wali kota, camat, san

lurah, Musrenbang harus betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena mengerti lapangan," ujar Prasetyo. Dia menegaskan, ini demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

Dia mendorong Pemprov untuk membuat terobosan. Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran Prasetyo akan jalkan fungsi pengawasan. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada permukiman kumuh hanya satu kilometer dari Istana Negara. Namanya Johar dan Tanah tinggi.

"Mana pemerintah daerah. Yang malu bukan hanya Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini," jelas Prasetyo. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, meski telah dilaksanakan program kegiatan prioritas dalam anggaran perencanaan, ada beberapa tantangan yang juga turut diperhatikan. Dia menyebut keterbatasan APBD dapat mempengaruhi akselerasi pembangunan infrastruktur perpindahan Ibu Kota Negara.

Lalu, perubahan paradigma dalam implementasi kegiatan

berstandar internasional, dan penciptaan kegiatan ekonomi perkotaan yang baru untuk mewujudkan kota global yang kompetitif.

Adapun Musrenbang RKPD 2025 dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian program prioritas perangkat daerah 2025 terhadap penyelesaian isu-isu prioritas tahun 2025.

Musrenbang RPJPD 2025-2045 bertujuan menanamkan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan Jakarta untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dan selaras dengan RPJP Nasional. ■ Ant/G-1